



Media: Joglo Jogja

Hari: Kamis

Tanggal: 09 Juli 2026

Halaman: 1

UTAMA: ✓
Wakil Wali Kota
Yogyakarta
Wawan Harmawan
memberikan
tanggapan dalam
exit meeting evaluasi
perencanaan dan
penganggaran APBD
tahun 2026 Kota
Yogyakarta di Balai
Kota Yogyakarta.



DOK PEMKOT YOGYAKARTA/JOGLO JOGJA

Pindai
di sini!



Instagram : @joglojogjanews
Twitter : @joglojogja.id
Facebook : Joglonews Jogja
Website : www.joglonews.com
Phone : 082-137-485-834

APBD Kota ✓ 21,74 Persen Tak Efektif

YOGYAKARTA, *Joglo Jogja* - Hasil evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DIY terhadap perencanaan dan penganggaran APBD 2026 Kota Yogyakarta menunjukkan masih terdapat 21,74 persen program yang dinilai tidak efektif. Angka tersebut muncul dari hasil uji kualitas logika perencanaan atas total anggaran Rp 303 miliar yang dievaluasi oleh BPDIIY

Kepala Perwakilan BPKP DIY Dessy Adin mengungkapkan, evaluasi yang telah berjalan sejak Maret lalu ini menyasar lima sektor prioritas, pengentasan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, penurunan stunting, dan ketahanan pangan.

■ Baca APBD... Hal II

APBD Kota 21,74 Persen Tak Efektif ✓

sambungan dari hal Joglo Jogja

Meski secara umum hasil evaluasi dinilai cukup bagus dengan 76,43 persen program dinyatakan efektif, catatan mengenai 21,74 persen ketidakefektifan tersebut menjadi poin penting untuk perbaikan ke depan.
"Secara umum hasilnya cukup

bagus. Sebagian besar indikator menunjukkan hasil yang memadai untuk mengungkit ketercapaian sasaran utama sektor," ujar Dessy kemarin (8/7/2026).
Menanggapi hasil evaluasi tersebut, Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Harmawan

menegaskan, komitmen Pemkot untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPKP DIY.
Ia menyebut masukan tersebut sangat berharga untuk menjaga integritas dan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah agar lebih berdampak

langsung bagi masyarakat.
"Hasil yang dicapai sudah cukup bagus, tinggal beberapa catatan dan bagaimana kita bisa mengembangkannya lagi. Kami ingin menjunjung tinggi integritas dalam mengelola anggaran," tegas Wawan.

Di sisi lain, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Kota Yogyakarta Agus Tri Haryono menjdaskan, faktor ketidakefektifan program tidak sepenuhnya berpangkal pada persoalan internal Pemkot. Ia menyoroti kendala teknis terkait

regulasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
"Terkait keterbatasan nomenklatur program, SIPD tidak menyediakan ruang untuk menempatkan aktivitas pendukung dari program tersebut," jelas Agus.
Ke depan, Pemkot Yogyakarta

berkomitmen melakukan penelaahan ulang atas target indikator, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan, serta memperkuat prosedur analitis pada setiap sub-kegiatan agar lebih berorientasi pada *output* dan *outcome* yang berkualitas (*eri/and/wa*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Wakil Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005